

# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2015



Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon



# PEMERINTAH KOTA CIREBON INSPEKTORAT

Jl. Siliwangi No. 113 Tlp (0231) 206011 - 206015 Fax. (0231) 206604  
Email: inspektorat.crb@gmail.com  
**CIREBON**

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Cirebon, 30 Maret 2016

Inspektur Kota Cirebon



Ir. Eddy Krisnowanto, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198703 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya maupun pelaksanaan pembangunan, yang telah direalisasikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahap berikutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan upaya penguatan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon.

Upaya untuk mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja tersebut tentulah tidak akan lepas dari berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu kami akan terus ber-ikhtiar dan ber-munajat, agar dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan tersebut, Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada secara efektif, efisien dan produktif, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, Maret 2016

WALIKOTA CIREBON,

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	2
PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Isu Strategis .....	6
PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON.....	17
2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 ...	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2. Pencapaian Indikator Per Masing-Masing Sasaran.....	41
3.4. Hambatan dan Upaya Pencapaian Indikator Sasaran .....	102
3.5. Perbandingan dengan Target Nasional .....	103
3.6. Evaluasi dan Analisis Anggaran .....	124
PENUTUP .....	136
4.1. Kesimpulan .....	136
4.2. Saran .....	142

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen tata kelola pemerintahan.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mindset* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, dengan kata lain transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari pada hasil (*result oriented accountability*) terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan kata lain LKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dalam perspektif yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik. LKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assessment* maksudnya instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

## **1.2. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **1) Aspek Fisik dan Lingkungan**

### **a. Lingkungan Hidup**

Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Beberapa isu dalam urusan Lingkungan Hidup yang harus menjadi perhatian adalah

- 1) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengendalian pencemaran air (air tanah dan air permukaan), serta pengendalian pencemaran udara dan kebisingan
- 2) Pengendalian kerusakan lingkungan meliputi :
  - Pengendalian erosi, Abrasi dan akresi pantai,
  - Pengendalian penurunan muka tanah (deplesi) dan intrusi air laut,
- 3) Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Kota Cirebon yang merupakan kota dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometeorologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.

4) Penanggulangan Bencana

Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam Kota Cirebon. Berbagai potensi bencana tersebut antara lain banjir (termasuk rob dan genangan), tanah longsor, pohon tumbang dan kebakaran. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

5) Pengelolaan Sampah

Dalam sektor kebersihan, faktor-faktor yang menjadi isu antara lain:

- a. volume atau laju timbulan sampah yang setiap tahun meningkat
- b. pola pelayanan yang masih menggunakan pola lama yaitu kumpul, angkut, buang
- c. regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah
- d. peran serta masyarakat yang masih harus ditingkatkan
- e. Keterbatasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sampah.

**b. Pekerjaan Umum**

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran drainasenya dan jembatan, serta prasarana sumber daya air dan jaringannya yang cukup dan baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya suatu daerah. Pembangunan dan upaya peningkatan serta sektor pekerjaan umum sudah dilakukan selama ini, namun tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang. Pada tahap 2013-2018 ini diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan urusan pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pengendalian banjir dan antisipasi pasang laut/rob Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang menjadi isu yang harus diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut.

Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi.

- 2) Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran drainase dan prasarana jalan
- 3) Masih terbatasnya prasarana jalan di Wilayah Selatan (Kelurahan Argasunya), perlu upaya untuk dapat memperlebar jembatan tol yang ada sehingga lebih representatif.
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air di wilayah selatan (kelurahan Argasunya),
- 5) Ketergantungan pada sumber air Panis sebagai sumber air baku PDAM Kota Cirebon yang melayani kebutuhan air bersih skala Kota

### **c. Penataan Ruang**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2011-2031 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian pada periode tahun 2013-2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insentif-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
- 2) Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah,

mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan *land mark*. untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal.

**d. Perumahan**

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Beberapa permasalahan terkait urusan perumahan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik.
- 2) Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh
- 3) Perlunya penataan dan pengembangan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan
- 4) Perlu optimalisasi penataan Tempat Pemakaman Umum .

**e. Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah .

- 1) kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan juga prediksi kemacetan akan semakin meningkat seiring dengan berfungsinya duo double track kereta api yang melintasi Kota Cirebon
- 2) kondisi kuantitas dan kualitas angkutan umum yang memerlukan pembenahan,;
- 3) Tingkat keselamatan berlalu lintas yang harus ditingkatkan

- 4) perlunya moda transportasi massal yang nyaman dan representatif,
- 5) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perparkiran.

#### **f. Komunikasi dan Informasi**

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informasi pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

- 1) Keterbukaan informasi publik
- 2) Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)

#### **g. Pertanahan**

Tertibnya administrasi pertanahan merupakan salah satu indikator kepastian kepemilikan lahan. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2011-2015 untuk urusan pertanahan, sebagai berikut.

- 1) Belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan kabupaten.
- 2) Administrasi kepemilikan tanah termasuk asset tanah pemerintah daerah belum tertib.

#### **h. Energi dan Sumber daya Mineral**

Permasalahan terkait urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.:

- 1) Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan galian C liar
- 2) Belum optimalnya elektrifikasi rumah tangga.

### **3) Aspek Sosial Budaya**

#### a. Kesehatan

- Perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan guna lahan secara lokal yang berdampak terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Penyakit-penyakit yang terjadi akibat perubahan iklim cenderung meningkat dan memerlukan penanganan

lebih lanjut. Upaya preventif perlu dilakukan sejak sekarang dengan mengembalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekitar diantaranya dengan meningkatkan standar kualitas sanitasi masyarakat.

- Dengan meningkatnya karakteristik urban yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat aktivitas kota, akan mengakibatkan bertambahnya jam kerja seseorang. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap makanan yang siap saji atau makanan yang disajikan di luar rumah. Data yang ada menunjukkan kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular pada masyarakat kota termasuk Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi transisi penyakit epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular. Hal penting yang perlu dilakukan diantaranya dengan Upaya kesehatan masyarakat promotif dan preventif dengan menjalankan kuratif dan Rehabilitasi.

b. Pendidikan

- ❖ Sebagai daerah yang telah menganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, Kota Cirebon termasuk yang memiliki angka indeks pendidikan tertinggi se wilayah Ciayumajakuning. Rata-rata lama sekolah mendekati 10 (sepuluh) tahun, namun ini masih jauh dari target rata-rata lama sekolah Kota Cirebon yaitu 12 tahun. Angka putus sekolah terutama untuk tingkat SMA masih jauh dari harapan sementara untuk tingkat SD dan SMP sudah sesuai target. Salah satu aspek penting untuk menurunkan angka putus sekolah adalah dengan mengalokasikan biaya operasional sekolah hingga tingkat SMA.
- ❖ Untuk mengejar ketertinggalan dan mempertahankan rata-rata lama sekolah yang ada, maka perlu dicanangkan wajib belajar bukan hanya hingga 12 tahun tetapi hingga 15 tahun sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon adalah setingkat SMA. Selain itu untuk membantu masyarakat Kota Cirebon yang akan melanjutkan jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi,

pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi bagi warga kota yang akan melanjutkan pendidikan terutama untuk kalangan tidak mampu.

- ❖ Isu strategis lainnya di bidang pendidikan mencakup mutu tenaga pendidik yang diharapkan selama lima tahun ke depan 90 persen tenaga pendidik di Kota Cirebon telah bersertifikasi.

c. Sosial

- Salah satu isu strategis di bidang sosial adalah soal kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, pendataan yang masih belum seragam menjadi salah satu kendala dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Dengan diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2015 maka perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk mendukung pemberlakuan program tersebut.
- Angka pengangguran yang cukup tinggi perlu upaya peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat, selain terkait pula dengan tingkat pendidikan. Peningkatan daya saing masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan mengingat pada tahun 2015 akan diterapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- Sebagai salah satu kota dengan lahan yang minim pertanian dan perkebunan, maka aspek ketahanan pangan bagi Kota Cirebon menjadi penting. Oleh karena itu perlu diupayakan perlindungan terhadap kawasan-kawasan produktif pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

d. Perlindungan anak dan perempuan

- ✓ Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

- ✓ Isu strategis lainnya dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bahwa terutama di tingkat RT atau RW. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membuat kawasan percontohan RW ramah anak atau RT ramah anak. Selain itu di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum perlu diupayakan pula untuk menjadi ramah anak misalnya di terminal dan stasiun Kereta Api.

#### **4) Aspek Ekonomi Keuangan**

Beberapa isu strategis dalam bidang ekonomi keuangan adalah :

- a. Perlunya penyederhanaan perizinan, insentif dan disincentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang, hal ini terkait dengan investasi yang berkembang semakin pesat di Kota Cirebon.
- b. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, terutama dengan melibatkan lingkungan alternatif misalnya pondok pesantren, mesjid, dan kelompok pemuda.
- c. Penanganan sektor informal terutama pedagang kaki lima dengan mengalokasikan ruang, baik yang sudah dimiliki atau membebaskan baru untuk keberadaan PKL dalam rangka pembinaan sektor informal menjadi formal.
- d. Pelestarian budaya dan aset wisata daerah terutama dengan banyaknya potensi wisata ziarah dan berbasis keislaman di Kota Cirebon.

#### **5) Aspek Pemerintahan**

- a. Dalam rangka mendukung kinerja Pelayanan Pemerintahan Kota Cirebon diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketenteraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi aman, tenteram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan

langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran. Kondisi yang tenteram dan tertib dapat dicapai melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

- b. Untuk mendukung kinerja Pemerintahan Kota Cirebon, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Kota Cirebon cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, akuntabilitas keuangan daerah kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.
- c. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
- d. Terkait dengan indeks persepsi korupsi yang masih belum memenuhi standar, maka diperlukan upaya konsisten untuk melaksanakan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

yang telah disahkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Cirebon 2012 – 2017. Selain upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan walikota tersebut.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1.RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018, visi dan misi pembangunan di Kota Cirebon telah dinyatakan secara jelas dan gamblang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun sekali yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah.

Adapun visi dan misi kota cirebon tersebut adalah sebagai berikut:

#### Visi

Visi Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon tahun 2013-2018 adalah:

**TERWUJUDNYA KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA YANG RELIGIUS, AMAN, MAJU DAN ASPIRATIF (RAMAH) PADA TAHUN 2018**

#### Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Misi Kota Cirebon tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:



### **Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategis pembangunan dan saran untuk mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Tujuan juga dirumuskan sebagai sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan selain dinyatakan dalam bentuk kuantitatif juga menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Pemerintah Kota Cirebon dalam Visi RPJMD dirumuskan sebagai berikut:

Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon yang religius

- Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan
- Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan di masyarakat.

Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN.

- Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD.
- Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal.
- Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif.
- Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

- Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
- Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Menegakkan peraturan dan perundang-undangan.
- Menegakkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.
- Meningkatkan tertib lalu lintas dan perparkiran.
- Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota.
- Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana.

Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat;

- Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat;
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- Meningkatkan olah raga prestasi;
- Mewujudkan kota Cirebon sebagai kota pusaka;
- Meningkatkan daya beli masyarakat;
- Menurunkan jumlah keluarga miskin;
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

- Meningkatkan keterlibatan pelaksanaan dan masyarakat dalam pengawasan perencanaan, pembangunan

Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

- Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, nyaman dan berkelanjutan bagi warga.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
- Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan.

### **Sasaran**

Sasaran dirumuskan sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur lewat pencapaian indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran memiliki rencana tingkat capaian (target) masing-masing yang diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tahunan melalui pencapaian indikator kinerja utama.

Misi 1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota Cirebon yang religius

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan nilai ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan di masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya.
	Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi
	Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak adanya kasus konflik yang bernaluansa agama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan
	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 % per tahun	Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100 %
	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan
	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%
<b>Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal</b>	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon
<b>Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mengayomi dan komunikatif</b>	Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%
	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar 95 %
<b>Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel</b>	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 %
		Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-goverment 100%
		Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia</b>	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-bhinneka tunggal ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus
<b>Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat</b>	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk
<b>Menegakkan peraturan dan perundang- undangan</b>	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik
<b>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan Kota Cirebon</b>	Terwujudnya RW K-3	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan
<b>Meningkatkan tertib lalu lintas dan perparkiran</b>	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %
<b>Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota</b>	Tertatanya sektor informal	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan
		Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana</b>	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat</b>	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun  Rata - rata lama sekolah (13 Tahun)
<b>Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat</b>	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat  Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka harapan hidup 71,1 tahun  Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS
<b>Meningkatkan olah raga prestasi</b>	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat propinsi	Meraih posisi 5 besar tingkat propinsi di tahun 2018
<b>Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka</b>	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012  Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di th 2012)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Meningkatkan daya beli masyarakat</b>	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018
<b>Menurunkan jumlah keluarga miskin</b>	Menurunnya jumlah KK miskin	rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota
<b>Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak</b>	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus
<b>Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penurunan PMKS 5 % di tahun 2018
<b>Meningkatkan pengaruh utamaan gender</b>	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender diatas 30% perempuan

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</b>	Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan	Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)
	Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW	Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota</b>	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat	luas ruang terbuka hijau publik menuju 10 % pada akhir tahun 2018
		Jumlah Taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun
	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha
	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan : udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi
	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%
		Rasio pengelolaan sampah berbasis RW Zero waste 20 %
<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan</b>	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %
	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik
	Jumlah jamban dan septitank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)	
	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80 %
<b>Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota</b>	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun..... Kasus
<b>Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20 %
	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah
	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

## 2.2.PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2015

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1.1.1</b>	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	75%
<b>1.2.1</b>	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	80%
<b>1.2.2</b>	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi	Peringkat 7 tingkat provinsi
<b>1.2.3</b>	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama	0 kasus
<b>2.1.1</b>	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	5 kasus/1000 PNS
		Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	100%
<b>2.1.2</b>	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WDP
		Meningkatnya kesesuaian APBD	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			dengan dokumen perencanaan 100%	
2.1.3	Terwujudnya administrasi daerah tertib kearsipan	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	100 berkas	
2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%	80 poin	
		Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	PMA (280 M) PMDN (475 M)	
2.1.5	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%	80 poin	
2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018	5%	
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95%	80 poin	
2.3.2	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	0 titik	
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	88% (1 peraturan e-government)	
		Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	38 sistem yang terbangun	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>3.1.1</b>	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus
<b>3.2.1</b>	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	22%
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	40 titik
<b>3.3.1</b>	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan	9 kasus
<b>3.4.1</b>	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	20%
<b>3.5.1</b>	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan
<b>3.6.1</b>	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya	50%
<b>3.7.1</b>	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari
<b>4.1.1</b>	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	13 tahun di tahun 2011
		Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	11,5 tahun 2011
<b>4.2.1.</b>	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1	70,13 tahun 2011
<b>4.2.2.</b>	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	66%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>4.3.1.</b>	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018	11 besar tingkat provinsi
<b>4.4.1.</b>	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	35%
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	74 jenis
<b>4.5.1.</b>	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	391.567
<b>4.6.1.</b>	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	28,14%
<b>4.7.1.</b>	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	26 kasus
<b>4.8.1.</b>	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	29.919 orang
<b>4.9.1.</b>	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender di atas 30% perempuan	34%
<b>5.1.1.</b>	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	2,9%
<b>5.1.2.</b>	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	5%
<b>6.1.1.</b>	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	9,88%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	68%
6.1.2.	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	0,4 Ha
6.1.3.	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi
6.1.4.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	74%
		Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	5%
6.2.1.	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	98,10%
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	94%
6.2.2.	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	16 titik
6.2.3.	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik	94%
		Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	69,58%
6.2.4.	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	74%
6.3.1.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>6.4.1.</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%	26%
<b>6.4.2.</b>	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah	15.056 rumah
<b>6.4.3.</b>	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	84%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah kota cirebon. setiap akhir tahun setiap instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon tahun 2015 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas perjanjian kinerja pemerintah kota cirebon tahun 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018. Ringkasan pengukuran kinerja pemerintah kota cirebon tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
<b>Misi Ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon yang religius</b>						
1.1.1	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	75%	20%	26%	BKD
1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	80%	90%	112,5%	SETDA
1.2.2	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi	Peringkat 7 tingkat provinsi	10	0	SETDA

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
1.2.3	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik yang bermuansa agama	0 kasus	0 kasus	100%	KANTOR KESBANGPOL
<b>Misi ke-2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN</b>						
2.1.1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	99%	132%	BKD
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	5 kasus/ 1000 PNS	4 kasus/ 1000 PNS	120%	BKD
		Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	100%	100%	100%	BKD
2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WDP	WDP	100%	DPPKAD
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	9/70	64,29%	BAPUSIPDA
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	100 berkas	136 berkas	136%	BAPUSIPDA
2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%	80 poin	74,51 poin	93,14%	BPMPPT
		Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	PMA (280 M) PMDN (475 M)	PMA (na) PMDN (1.321.066.815.350)		BPMPPT

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
2.1.5	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%	80 poin	79,83 poin	99,79%	DISDUKCAPIL
2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018.	5%	5%	100%	SETDA
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95%	80 poin	Na	Na	DISHUB
2.3.2	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	0 titik	0 titik	100%	SETDA
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	88% (1 peraturan e-government)	0	0	DISHUBINKO M
		Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	38 sistem yang terbangun	38 sistem	100%	DISHUBINKO M
<b>Misi ke-3: Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum</b>						
3.1.1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus	100%	KANTOR KESBANGPOL
3.2.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	22%	Na	Na	????
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	40 titik	Na	Na	KANTOR KESBANGPOL
3.3.1	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan	9 kasus	17 kasus	-188,89%	SATPOLPP
3.4.1	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	20%	Na	Na	BPMPPKB

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
<b>3.5.1</b>	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik	88,89%	DISHUBINKOM
<b>3.6.1</b>	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya	50%	70%	140%	DISPERINDAG KOPUKM
<b>3.7.1</b>	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari			KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMKAR  DINAS SOSNAKERTRANS
<b>Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat</b>						
<b>4.1.1</b>	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun  Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	13 tahun di tahun 2011  11,5 tahun 2011	Data belum keluar dari BPS  Data belum keluar dari BPS	Data belum keluar dari BPS  Data belum keluar dari BPS	DISDIK  DISDIK
<b>4.2.1.</b>	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1	70,13 tahun 2011	71,81	100	DINAS KESEHATAN
<b>4.2.2.</b>	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS.	66%	81,45%	123,41%	BPMPPKB
<b>4.3.1.</b>	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	100%	DISPORABUD PAR
<b>4.4.1.</b>	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	35%	33,09%	94,54%	DISPORABUD PAR
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	74 jenis	74 jenis	100%	DISPORABUD PAR

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
4.5.1.	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat				DISPERINDAG KOP KANTOR KETAHANAN PANGAN DINSOSNAKE RTRANS DKP3
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	391.567	686.121	175,22%	DISPORABUD PAR
4.6.1.	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	28,14%	Data belum ada	Data belum ada	DINSOSNAKE RTRANS BAPPEDA BPMPPKB DISDIK DINAS KESEHATAN DPUPESDM DISPERINDAG KOP
4.7.1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	26 kasus	60 kasus	-30,77%	BPMPPKB
4.8.1.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	29.919 orang	102.702 orang	-143,26%	DINSOSNAKE RTRANS
4.9.1.	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender diatas 30% perempuan	34%	0%	0%	BPMPPKB
<b>Misi ke-5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan</b>						
5.1.1.	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	2,9%	0,34%	11,72%	BPMPPKB BAPPEDA
5.1.2.	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	5%	7,2%	144%	BPMPPKB
<b>Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup</b>						
6.1.1.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	9,88%	10,0008%	101,70%	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANA N

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
	publik dan privat	Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	68%	Na	Na	DKP
<b>6.1.2.</b>	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	0,4 Ha	Na	Na	DKP
<b>6.1.3.</b>	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 5 lokasi, air sungai 7 lokasi, air laut 3 titik	100%	KANTOR LH
<b>6.1.4.</b>	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	74%	73%	98,65%	DKP
		Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	5%	5%	100%	DKP
<b>6.2.1.</b>	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	98,10%	80%	81,55%	DPUPESDM
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	94%	91,83%	97,69%	DPUPESDM
<b>6.2.2.</b>	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	16 titik	2 titik	-12,5%	DPUPESDM
<b>6.2.3.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik	94%	100%	106,38%	DPUPESDM
		Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	69,58%	89,32%	128,37%	DPUPESDM
<b>6.2.4.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	74%	93,47%	126,31%	DPUPESDM
<b>6.3.1.</b>	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus.	10	10	100%	DPUPESDM

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	SKPD Pengampu
	ruang kota yang konsisten					
6.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%.	26%	3,22%	-12,38%	DPUPESDM
6.4.2.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah.	15.056 rumah	2000 rumah	-13,29%	DPUPESDM
6.4.3.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	84%	84%	100%	DISHUBINKOM

### 3.2. Pencapaian Indikator Per Masing-Masing Sasaran

Adapun hasil pencapaian masing-masing misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota Cirebon yang religius

#### Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan para aparatur pemerintahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	%	75	20	26% (kurang)

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pencapaian realisasi terhadap "rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap

bulan dibagi seluruh SKPD 100%” adalah sebesar 20%, artinya dari target yang diharapkan yaitu 75% dari seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota cirebon hanya sekitar 20% yang melaksanakan kegiatan keagamaan rutin tiap bulan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, program yang dilaksanakan yaitu: program peningkatan kualitas religius aparatur.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	100,534,050.00	98,909,050.00	98.38%

Pencapaian sasaran “Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan para aparatur pemerintahan” sebesar 26% berada dalam kategori **kurang**. Rendahnya pencapaian sasaran tersebut disebabkan oleh:

- Implementasi dari program peningkatan kualitas religius aparatur telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. Fasilitasi kegiatan siraman rohani (sekretariat daerah); dan
  2. Pembinaan rohani aparatur (BKD, Kecamatan harjamukti).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015 hanya 3 SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap bulan dengan menggunakan anggaran, dengan demikian belum seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Cirebon melaksanakan kegiatan rutin keagamaan setiap bulan.

Saat ini kota Cirebon, dalam segi perencanaan, mengacu dan berpedoman kepada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, hal tersebut menandakan bahwa tahun 2015 merupakan tahun kedua bagi kota Cirebon dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon sebagai SKPD penanggung jawab berdasarkan LAKIP Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Tahun 2015 menyatakan pencapaian indikator sasaran adalah 20%.

Tidak ada koordinasi yang baik antara BK Diklat dan SKPD di lingkungan kota Cirebon dalam upaya mencapai sasaran ini, untuk itu dalam merencanakan kegiatan di tahun yang akan datang seluruh SKPD harus mampu merumuskan langkah konkret dalam upaya mencapai indikator tersebut atau perlu dievaluasi kembali indikator sasaran yang dimaksud sehingga kinerja pemerintah kota Cirebon dapat meningkat dan dicapai dengan baik.

### **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	%	80	90	112,5%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan kualitas sarana peribadatan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	260,922,300.00	223,062,300.00	85.49%

Sebagai implementasi dari program peningkatan kualitas sarana peribadatan telah dilaksanakan kegiatan yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi bantuan sarana peribadatan
2. Fasilitasi kegiatan tarhim romadhan
3. Sosialisasi mekanisme hibah bansos untuk sarana peribadatan.

### **Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi	Peringkat	7	10	0

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan, pelaksanaan lomba.

Dengan arah kebijakan yaitu: Pembinaan keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan kompetensi keagamaan. Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program peningkatan kompetensi keagamaan	1,835,101,000.00	1,652,599,969.00	90.05

Pencapaian sasaran “Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan” tidak dapat terealisasi dengan baik (0).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan diantaranya adalah;

1. mengirimkan kafilah kota Cirebon dalam MTQ dan STQ untuk mengikuti lomba tingkat provinsi Jawa barat.

2. Mengadakan lomba MTQ dan STQ tingkat kecamatan untuk menyaring bibit-bibit unggul agar dapat diikutsertakan dalam lomba MTQ tingkat provinsi.

**Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Kasus	0	0	100% (baik)

Pencapaian sasaran “Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing” berada dalam kategori **baik** (100%).

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah Program kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Kerukunan Umat Beragama	1,029,252,900.00	839,847,100.00	81.60%

Implementasi program kerukunan umat beragama maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kota Cirebon adalah:

1. Peringatan hari-hari besar keagamaan; dan
2. Fasilitasi kegiatan tasyakuran pemerintah kota Cirebon.
3. Pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah menampung dan berdiskusi antar pemuka agama tingkat kota Cirebon.

Misi ke-2:Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN

**Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	75	99	132% (BAIK)
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	Kasus/1000 PNS	5	4	120%
Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	%	100	100	100% (baik)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sasaran “terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional” dengan 3 indikator sasaran mampu tercapai dengan baik.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 jumlah PNS yang melanggar disiplin adalah sebanyak 4 kasus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon mengalami kenaikan sebesar 50%, hal tersebut mengindikasikan bahwa PNS kota cirebon sudah mulai mampu menerapkan disiplin yang baik.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pendidikan kedinasan.
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pendidikan Kedinasan	825,735,900.00	776,077,400.00	93.99%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,069,579,525.00	1,881,933,675.00	90.93
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,110,399,680.00	1,659,154,510.00	78.62%

Pencapaian sasaran “Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional” dengan 3 indikator dapat tercapai dengan baik, sebagai upaya untuk mencapai sasaran dimaksud pemerintah kota Cirebon melalui badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikutkan PNS yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan sebagai syarat menduduki jabatan struktural.
2. Mengikutkan PNS untuk mengikuti kegiatan Diklat fungsional.
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian daerah sebagai database kepegawaian di kota Cirebon.
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin PNS di kota Cirebon.

#### **Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	Opini	WDP	WDP	100% (baik)
Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	%	100	100	100% (baik)

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas diperoleh data bahwa sasaran “terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD” tercapai dengan baik.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
4. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD.
6. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
2. Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).
4. Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD.
6. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah.
7. Publikasi hasil serta pembangunan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5. Program perencanaan pembangunan daerah.
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

7. Program pengembangan data/informasi perencanaan.

8. Program pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	1,386,424,300.00	1,109,904,100.00	80.06%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	630,494,000.00	539,138,000.00	85.51%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,022,726,525.00	2,411,561,150.00	79.78%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	196,917,400.00	120,081,700.00	60.98%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,879,169,300.00	1,747,706,450.00	93.00%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	314,843,000.00	308,702,000.00	98.05%
Program Pengembangan Data/Informasi	188,625,000.00	163,429,000.00	86.64%
Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1,270,231,500.00	970,384,000.00	76.39%

Pencapaian sasaran “Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD” dengan 2 indikator dapat tercapai dengan baik. Pemerintah kota Cirebon saat ini tengah berupaya untuk mencapai penilaian “wajar tanpa pengecualian” atas opini BPK terhadap audit keuangan di kota Cirebon.

Sebagai bentuk dari tertib anggaran dan tertib administrasi Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan seperti:

1. Tersedianya buku kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
2. Sosialisasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
3. Tersedianya dokumen laporan bulanan penatausahaan keuangan daerah (jurnal, buku besar, daftar saldo buku besar, arus kas dan laporan realisasi keuangan)

4. Monitoring evaluasi keuangan di seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Cirebon
5. Pengelolaan dan pendampingan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam aspek perencanaan BAPPEDA sebagai pelaksana urusan perencanaan di kota Cirebon melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan seperti:

1. Penyusunan evaluasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
2. Memberikan asistensi penyusunan evaluasi rencana strategis SKPD di lingkungan pemerintah kota Cirebon.
3. Menyusun RKPD kota cirebon tahun 2015

### **Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	SKPD	14/70	9/70	64,29%
Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	Berkas	100 berkas	136 berkas	136%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

## *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	132,414,450.00	129,084,500.00	97.49

Pencapaian sasaran “Terwujudnya tertib administrasi karsipan daerah” dapat terealisasi dengan baik.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:

1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. Dilakukan dengan mengadakan boks arsip besar dan boks arsip kecil.
2. Mengadakan fumigasi di depo bapusipda.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan kondisi situasi data, serta
4. Mengadakan sosialisasi karsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

### **Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 95%	Poin	80	74,51	93,14%
Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	Rp	PMA 250 M PMDN 425 M	PMA (na) PMDN (1.321.066.815. 350)	

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Optimalisasi kelembagaan pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan Azas dan prinsip pelayanan.
2. Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perizinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan Online dan penerapan insentif dan disinsentif informasi.

2. Meningkatkan kerja sama investasi.

3. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program penataan dan pelayanan perizinan.

2. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi.

3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	775,678,800.00	766,370,200.00	98.80
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	658,132,000.00	646,863,000.00	98.29
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	49,400,000.00	49,400,000.00	100.00

Pencapaian sasaran “Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan” dapat terealisasi dengan baik.

Sebagai upaya mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah kota Cirebon melalui badan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan dan penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
3. Koordinasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
4. Penanganan pengaduan perizinan, serta
5. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Adapun kegiatan dalam upaya meningkatkan nilai investasi di kota Cirebon dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Menyelenggarakan pameran investasi.

2. Pengembangan potensi unggulan.
3. Melaksanakan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

### **Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%	Poin	80	79,83	99,79%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pendaftaran penduduk.
2. Program pelayanan pencatatan sipil.
3. Program sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Program perencanaan kebijakan kependudukan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pendaftaran Penduduk	1,109,676,500.00	989,723,500.00	89.19
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	407,755,000.00	394,844,000.00	96.83
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	480,162,800.00	474,192,800.00	98.76
Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan	744,051,000.00	712,134,000.00	95.71

Pencapaian sasaran “Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan” berada dalam kategori **Baik** (99,79%).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai indikator sasaran tersebut adalah:

1. Kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan (updating dan pemeliharaan).
2. Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Pemutakhiran data kependudukan di masyarakat.

### **Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi jabatan, ketatalaksanaan 100% di 2018	%	5	5	100

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel.

Dengan arah kebijakan yaitu: Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumber daya aparatur berdasarkan prinsip *good governance*.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program penataan kelembagaan.
2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program penataan kelembagaan	718,348,500.00	53,166,000.00	7.40

## *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	72,032,000.00	70,291,800.00	97.58
--	---------------	---------------	-------

Pencapaian sasaran “Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD” dapat terealisasi dengan baik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah:

1. Melaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kota Cirebon.
2. Melaksanakan kegiatan evaluasi kelembagaan.
3. Melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan seperti sosialisasi standar operasional prosedur, sosialisasi standar pelayanan minimal.

### **Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	Titik	0	0	100% (baik)

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan kabupaten cirebon.

Dengan arah kebijakan yaitu: Menyelesaikan penegasan batas daerah antara kota Cirebon dan kabupaten cirebon.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pembinaan pemerintahan.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pembinaan Pemerintahan	620,646,500.00	298,059,025.00	48.02

Pencapaian sasaran “Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon” berada dalam kategori **baik** (100%).

Sebagai upaya pencapaian indikator sasaran tersebut, pemerintah kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan urusan administrasi kependudukan dan agraria.
2. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan urusan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.
3. Penyusunan LPPD Kota.
4. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tugas kerja sama dan tugas pembantuan.
5. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tata pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang kurang memiliki korelasi terhadap pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator sasaran tersebut.

**Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100%	%	84% (1 peraturan e-government)	0	0
Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai	Sistem yang terbangun	38	38	100%

penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%				
---	--	--	--	--

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Dengan arah kebijakan yaitu: Mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data Center) yang reintegration antar instansi, membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan e-government.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	1,362,000,000.00	1,346,729,000.00	98.88

Misi ke-3:Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota Cirebon yang religius

#### **Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	Kasus	0	0	100%

## *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	55,532,500.00	49,990,500.00	90.02

Pencapaian sasaran “Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Sebagai kota yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan, kota Cirebon memiliki dinamika sosial yang tinggi, namun tidak pernah ada gejolak sosial dan kriminalitas yang berkaitan dengan ras dan agama.

### **Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2013		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	%	22	Na	Na
Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	Titik	40	Na	Na

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan peran serta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum.
2. Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling.
3. Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan kantrantibmas.
4. Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum.
5. Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Program pembinaan pemuda di daerah rawan ketertiban umum.
5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	281,486,250.00	279,241,050.00	99.20
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	236,122,450.00	226,169,000.00	95.78
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	830,085,900.00	724,521,300.00	87.28

Pencapaian sasaran “Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum” dapat terealisasi dengan cukup baik (77,78%). 1 indikator yang berkaitan dengan rasio angka kriminalitas dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak dapat terukur karena hal

tersebut berkaitan dengan urusan yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort kota Cirebon.

Dalam upaya mengurangi lokasi rawan ketertiban umum, Pemerintah kota Cirebon telah melakukan upaya-upaya seperti:

1. Penguatan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban dengan bentuk kegiatan siskamling di masing-masing RW.
2. Peningkatan peran serta aparatur linmas yang ada di RW di masing-masing kelurahan.
3. Pelaksanaan patroli rutin.
4. Pelaksanaan razia pekat (penyakit masyarakat).

#### **Menurunnya tingkat pelanggaran perda**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan	Kasus	9	17	-188,89%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Menurunnya tingkat pelanggaran perda”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan penanganan potensi pelanggaran perda.

Dengan arah kebijakan yaitu: Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam sosialisasi dan penerapan perda.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program penegakan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program penegakan peraturan daerah	354,145,000.00	301,105,000.00	85.02

Pencapaian sasaran “Menurunnya tingkat pelanggaran perda” tidak dapat terealisasi dengan baik (-188,89%).

Pemerintah kota Cirebon melalui satuan polisi pamong praja kota Cirebon terus berupaya dan berusaha sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

### **Terwujudnya RW K-3**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	
Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	%	20	Na	Na

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya RW K-3”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penilaian K-3 tingkat RW.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program RW bersih.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program RW Bersih	495,136,750.00	473,809,900.00	95.69

Pencapaian sasaran “Terwujudnya RW K-3” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Sebagai bentuk upaya pencapaian sasaran tersebut di atas, pemerintah kota Cirebon melaksanakan kegiatan berupa lomba-lomba RW K-3 di lingkungan kota Cirebon.

### **Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015

		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN INDIKATOR SASARAN</b>
Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	Titik rawan kemacetan dan titik rawan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik	88,89%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
2. Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas.
3. Peningkatan keselamatan pelayaran.
4. Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang.
2. Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor.
3. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan keselamatan pelayaran.
5. Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir di luar badan jalan (*off street*) serta menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
4. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
6. Program peningkatan pelayanan perparkiran.

## *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3,004,320,000.00	3,112,622,700.00	103.60
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50,000,000.00	49,180,000.00	98.36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran	51,780,000.00	51,780,000.00	100.00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
Program Peningkatan Pelayanan Parkir	390,000,000.00	358,947,075.00	92.04

Pencapaian sasaran “Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan” dapat terealisasi dengan baik (88,89%).

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat dinamika dan mobilitas penduduk yang tinggi, hal tersebut diperparah dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan kota cirebon. Kota Cirebon adalah pusat kegiatan jasa se-wilayah III Cirebon (kuningan, Majalengka, Indramayu, kabupaten Cirebon) serta daerah perbatasan Jawa barat (Brebes, Tegal dan sekitarnya).

Berdasarkan hal tersebut, mengakibatkan tingkat lalu lintas di kota Cirebon semakin tinggi. Dalam upaya mengurangi titik rawan kemacetan khususnya di ruas-ruas potensi macet, pemerintah kota Cirebon melalui dinas perhubungan, informatika dan komunikasi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberahan marka jalan yang sudah rusak.
2. Pemberahan APILL (alat pengatur isyarat lalu lintas).
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan rehabilitasi terhadap marka jalan yang perlu di rehabilitasi.
5. Melaksanakan razia kendaraan.

### **Tertatanya sektor informal**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya	%	50	70	140%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tertatanya sektor informal”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Melakukan pendataan identifikasi jumlah PKL.
2. Menata ruang peruntukan bagi PKL.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pendataan dan pendaftaran PKL.
2. Penggunaan aset pemerintahan sebagai lokasi PKL.
3. Membuat peraturan tentang penyediaan ruang bagi PKL pada kawasan perkantoran dan perdagangan.
4. Melakukan pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pembinaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	250,049,800.00	245,268,800.00	98.09

Pencapaian sasaran “Tertatanya sektor informal” dapat terealisasi dengan capaian prosentase 83,33% atau dalam kategori baik.

Sektor informal merupakan salah satu masalah klasik di daerah-daerah perkotaan, begitu juga di kota Cirebon. Sebagai salah satu kota perdagangan yang menjadi

pusat perdagangan di wilayah III Cirebon, sektor informal menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang baik.

Sesuai dengan visi dan misi kota Cirebon tahun 2013-2018 sebagai kota “RAMAH” di dalam satu indikator sasaran yang menjadi tolok ukurnya adalah tertatanya sektor informal, terus berupaya dan berusaha untuk menata dan membina para pedagang kaki lima agar tercipta keindahan dan ketertiban namun tidak mengenyampingkan sisi kenyamanan serta kemudahan untuk berusaha di kota Cirebon.

Saat ini sebagai dasar hukum penataan kaki lima, sudah disusun peraturan walikota Cirebon tentang penataan pedagang kaki lima.

### **Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	100%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap darurat bencana.
3. Penyusunan kebijakan tanggap darurat bencana.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana.

2. Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan.
3. Membuat regulasi irigasi bencana dan strategi ketahanan kota.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
3. Program perencanaan, pengendalian dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

Program	TAHUN 2015		% Realisasi Anggaran
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,069,579,525.00	1,881,933,675.00	90.93
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3,527,215,580.00	3,421,301,000.00	97.00
Program perencanaan, pengendalian dan penanggulangan bencana			

Pencapaian sasaran “Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Kota Cirebon terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 108,33° dan 6,41° Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa bagian Barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter.

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Misi ke-4:Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan Masyarakat

**Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	Tahun	13 tahun di tahun 2011	Data belum keluar dari BPS	Data belum keluar dari BPS
Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	Tahun	11,5 tahun 2011	Data belum keluar dari BPS	Data belum keluar dari BPS

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya.
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik.
3. Pengembangan pendidikan non formal dan informal.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 12 tahun melalui BOP, penyediaan buku mata pelajaran dan LKS serta sarana dan prasarana pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
3. Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah.

4. Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal di tingkat RW.
5. Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan kelurahan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program manajemen pelayanan pendidikan.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pelayanan pendidikan SMK.
5. Program pendidikan non formal.
6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Program pendidikan anak usia dini.
8. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
9. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,558,045,594.00	35,480,792,700.00	2,277.26
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	70,199,912,216.00	65,068,065,632.00	92.69
Program Pendidikan Menengah	49,717,926,550.00	45,859,262,678.00	92.24
Program pelayanan pendidikan SMK			
Program Pendidikan Non Formal	455,230,000.00	452,461,095.00	99.39
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	869,860,750.00	843,126,500.00	96.93
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,515,123,300.00	1,400,509,550.00	92.44
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	339,362,200.00	332,296,100.00	97.92

## *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Program Perbaikan Sistem Administrasi Karsipan	162.190.950	156.915.950	96,75
--	-------------	-------------	-------

Pencapaian sasaran “Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan” dapat terealisasi dengan baik (100%).

### **Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Angka harapan hidup 71,1	Tahun	70,13 tahun 2011	71,81	100%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup sehat.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mengembangkan kawasan percontohan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan (rukun warga, sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum).
2. Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat di masyarakat.
3. Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga kota cirebon.
4. Menyediakan biaya operasional pelayanan kesehatan rujukan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus kelas III.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Program upaya kesehatan masyarakat.
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
6. Program pelayanan kesehatan lanjutan.
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	260,000,000.00	237,194,000.00	91.23
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22,769,812,268.00	19,083,254,901.00	83.81
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,517,196,250.00	1,464,248,000.00	96.51
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4,176,378,300.00	0.00	0.00
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	203,835,394,502.00	177,006,242,209.00	86.84
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	845,811,780.00	810,519,280.00	95.83

**Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	%	66%	81,45%	123,41%

Pencapaian sasaran “Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk” dapat terealisasi dengan baik (123,41%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengendalian kelahiran.

Dengan arah kebijakan yaitu: Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program keluarga berencana.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Keluarga Berencana	337,075,000.00	336,575,000.00	99.85

#### **Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018	Peringkat	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	100%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Pembinaan atlet berprestasi.
2. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan.
2. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

Program	TAHUN 2015		% Realisasi Anggaran
	TARGET	REALISASI	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,391,630,500.00	1,374,798,450.00	98.79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,105,000,000.00	1,641,013,000.00	148.51

Pencapaian sasaran “Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi” dengan 1 indikator dapat tercapai dengan baik.

Kota Cirebon dalam upaya menumbuh kembangkan dan meningkatkan prestasi olah raga telah melakukan berbagai macam kegiatan seperti:

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dengan melakukan pembinaan terhadap 9 cabang olah raga (atletik, renang, panahan, silat, gulat, karate, taekwondo, tinju dan judo).
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta terpeliharanya sarana olahraga stadion madya.
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
4. Fasilitasi pekan olahraga pemerintah daerah.
5. Fasilitasi pekan olahraga dan seni daerah, yaitu pelaksanaan pekan olahraga dan seni daerah perbatasan KUNCI BERSAMA (kuningan, kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, banjar dan pangandaran).
6. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. Serta
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga.

### **Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	%	35%	33,09%	94,54%
Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	Jenis	74 jenis	74 jenis	100%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Penetapan kalender budaya.
2. Penataan bangunan cagar budaya.
3. Revitalisasi pusaka cagar budaya.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni.
2. Meningkatkan even pagelaran budaya khas cirebon.
3. Melakukan penataan/revitalisasi bangunan cagar budaya.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya.
5. Meningkatkan kerja sama dengan pemilik cagar budaya dalam pelestarian pusaka cagar budaya.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pengelolaan keragaman budaya.
2. Program pengelolaan keragaman budaya.
3. Program pengelolaan kekayaan budaya.
4. Program pengelolaan kekayaan budaya.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	577,771,000.00	574,891,000.00	99.50
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	98,423,000.00	92,359,000.00	93.84

Pencapaian sasaran “Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan” dengan 2 indikator sasaran dapat tercapai dengan baik.

Pemerintah kota Cirebon melalui dinas pemuda, olahraga dan pariwisata dalam rangka pencapaian indikator dimaksud telah melaksanakan berbagai kegiatan yaitu:

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan memfasilitasi upacara tradisional daerah Cirebon seperti nadran, ngunjung, cap go meh, 1 muharram.
2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
3. Pengembangan kesenian dan keragaman budaya yaitu terfasilitasinya even teater awal, puser langit, sekar pandan, kelapa jajar, SMKI pakung wati, sela pandan, sekar budaya, konser karawitan muda, festival pesisir, festival seni budaya dan lomba jogregan.

#### **Meningkatnya indeks daya beli masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks daya beli masyarakat	Indeks			Data tidak ada
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	Orang	391.567	686.121	175,22%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya indeks daya beli masyarakat”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan Tribina (manusia, usaha, lingkungan).
2. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja.
3. Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan.
4. Peningkatan promosi wisata.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap UMKM.
2. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan.
3. Meningkatkan kompetensi BLK.
4. Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung.
5. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dikuasai untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
7. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif.
8. Meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
5. Program peningkatan kesempatan kerja.
6. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
7. Program peningkatan ketahanan pangan.
8. Program penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan.
10. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
11. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
12. Program peningkatan produksi peternakan.
13. Program peningkatan produksi perikanan tangkap.
14. Program peningkatan produksi perikanan budidaya.
15. Program pengembangan destinasi pariwisata.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	128,112,450.00	126,695,600.00	98.89
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	85,762,000.00	76,226,000.00	88.88
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	217,590,000.00	204,229,000.00	93.86
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	150,000,000.00	149,618,850.00	99.75
Program peningkatan kesempatan kerja			
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,214,941,000.00	1,191,933,000.00	98.11
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	170,994,000.00	168,213,950.00	98.37
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan			
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	314,833,500.00	309,716,750.00	98.37
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	489,925,000.00	472,479,000.00	96.44
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,210,401,500.00	3,145,626,490.00	97.98
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	177,253,250.00	174,505,750.00	98.45

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	454,712,500.00	418,237,000.00	91.98
Program pengembangan destinasi pariwisata	10,000,000,000.00	0.00	0.00

Pencapaian sasaran “Meningkatnya indeks daya beli masyarakat” dengan 2 indikator sasaran, 1 indikator belum memiliki data yaitu indeks daya beli masyarakat, hal tersebut disebabkan karena penghitungan indeks daya beli masyarakat melibatkan Badan Pusat Statistik. Adapun upaya pencapaian sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018” melampaui target. Pencapaian target tersebut dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
2. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata yaitu terlaksananya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
3. Melaksanakan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.
4. Pengembangan dan penguatan informasi dan database kepariwisataan.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dengan menjalin kerja sama antara keraton-keraton Cirebon pada even festival keraton nusantara.

**Menurunnya jumlah KK miskin**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	%	29,12	Data belum ada	Data belum ada

Sebagai upaya mencapai sasaran “Menurunnya jumlah KK miskin”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Menyediakan satu data keluarga miskin.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa beasiswa rawan DO.
4. Memberikan pendampingan pelayanan kesehatan rujukan.
5. Menyediakan akses pelayanan air bersih.
6. Menyediakan akses pelayanan air bersih.
7. Menyediakan akses pelayanan listrik.
8. Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah.
9. Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi.
10. Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis masjid dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program satu data keluarga miskin.
2. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan.
3. Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin.
4. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin.
5. Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin.
6. Program penataan kawasan perumahan masyarakat miskin.
7. Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin.
8. Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program satu data keluarga miskin			
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	239,336,500.00	234,666,500.00	98.05
Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin			
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	14,436,148,500.00	14,408,467,983.00	99.81
Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin			
Program penataan kawasan perumahan masyarakat miskin			
Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin	Dilaksanakan dengan program gizi mayarakat	Dilaksanakan dengan program gizi mayarakat	
Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin	2,293,953,600.00	1,728,379,100.00	75.34

Pencapaian sasaran “Menurunnya jumlah KK miskin” belum memiliki data.

Perhitungan jumlah penduduk miskin melibatkan Badan Pusat Statisik.

**Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Jumlah kasus	Kasus	26	60	-30,77%

Pencapaian sasaran “Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” tidak dapat terealisasi 28%.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan rukun warga layak anak.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Program RW layak anak.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	62,285,000.00	62,110,000.00	99.72
Program RW layak anak			

### **Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	Orang	29.919	102.702	-143,26%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penanganan PMKS.

Dengan arah kebijakan yaitu: Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
2. Program penguatan jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS.
3. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial.

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo			
Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	689,800,000.00	657,773,879.00	95.36

Pencapaian sasaran “Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial” tidak dapat terealisasi. Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperoleh data bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2013 adalah sebesar 73.645 orang, dalam RPJMD pada tahun 2015 ditargetkan bahwa jumlah PMKS menurun menjadi 30.645 orang, namun pada tahun 2015 jumlah PMKS membengkak menjadi 102.702 orang.

Jumlah PMKS tersebut tidak dapat tercapai hal tersebut dikarenakan masih menggunakan data dasar (tahun 2013) merupakan data lama yang belum pernah di update secara keseluruhan, sedangkan data pada tahun 2015 merupakan data hasil pendataan di lapangan (kecuali fakir miskin) yang dilakukan oleh para anggota tenaga kerja sosial kecamatan (TSKS), pekerja sosial masyarakat (PSM) dan karang taruna yang dihimpun dalam kegiatan sistem informasi sosial tenaga kerja dan transmigrasi tahun anggaran 2015. Selain itu, belum adanya kesinambungan koordinasi kegiatan pengentasan kemiskinan dengan unit kerja yang lain. Faktor lain adalah anggaran yang ada ditangani, selain tentu saja perubahan status PMKS memakan waktu yang lama, contohnya seseorang yang miskin menjadi tidak miskin membutuhkan proses dan waktu yang lama.

### **Terpenuhinya kesetaraan gender**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Rasio gender diatas 30% perempuan	%	34%	0%	0%
-----------------------------------	---	-----	----	----

Pencapaian sasaran “Terpenuhinya kesetaraan gender” belum terdapat data karena dalam pelaksanaan pencapaian data tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terpenuhinya kesetaraan gender”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penyajian data terpilih.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan peran dan keterwakilan gender di setiap kegiatan pembangunan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	105,431,000.00	103,911,000.00	98.56

Misi ke-5:Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

**Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	%	2,9	0,34	11,72%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan” belum memiliki data, karena masih dalam perhitungan.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1,625,346,800.00	1,603,999,900.00	98.69

#### **Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	
Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	%	5	7,2	144%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan” belum terdapat data karena masih dalam perhitungan.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat.

Dengan arah kebijakan yaitu: Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	476,845,000.00	413,411,000.00	86.70

Misi ke-6:Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

#### **Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	%	9,84	10,008	101,70%
Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	%	64	Na	Na

Pencapaian sasaran “Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat” belum memiliki data karena masih dalam perhitungan.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan ruang terbuka hijau.
2. Peningkatan kualitas ruang terbuka publik dan privat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani aset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH.
2. Membangun taman, taman interaktif melalui pembangunan/pengembangan taman kota sebagai ruang publik penyaluran kreativitas (*creative public space*) dan meningkatkan peran serta masyarakat, serta dengan menambah areal permakaman.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pengadaan ruang terbuka hijau.
2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau	3,023,917,000.00	2,393,987,000.00	79.17
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,139,570,000.00	2,049,048,950.00	95.77

#### **Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015
		TARGET	REALISASI	
Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	Ha	0,4	Na	Na

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya luasan cakupan pelayanan pemakaman”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penataan dan penambahan luas pemakaman.

Dengan arah kebijakan yaitu: Melakukan inventarisasi luas pemakaman dan kebutuhan pemakaman, menambah wilayah makam serta menata pemakaman dengan konsep ruang terbuka hijau.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum	10,000,000,000.00	8,930,791,649.00	89.31

### **Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	
Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi	Kualitas	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	100%

Pencapaian sasaran “Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup” tidak dapat terealisasi dengan baik (100%)

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan jin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi, penyediaan informasi SDA dan lingkungan, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfir.
2. Penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut. Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:
  1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  3. Program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	200,000,000.00	175,871,000.00	87.94
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	235,100,000.00	228,362,000.00	97.13
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	288,621,000.00	257,611,000.00	89.26

**Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	%	74%		
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	%	1		

Pencapaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA” belum memiliki data masih dalam proses penghitungan.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Penerapan konsep 3R.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat dan penyediaan sarana prasarana, kerja sama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA kopi luhur menjadi sanitary landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional.
2. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/hulu melalui pembangunan sentra 3R/pusat daur ulang, pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja bank sampah.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,304,410,007.00	15,868,535,231.00	140.37

**Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	%	96,80	90%	92,97

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	%	92	98	106,52%
--	---	----	----	---------

Pencapaian sasaran “Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat” dapat terealisasi dengan baik (92,97% dan 106,52%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan prasarana jalan dan jembatan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	253,800,100.00	251,355,000.00	99.04
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11,325,305,650.00	11,277,220,650.00	99.58

**Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	Titik	16	2	-12,5%

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim” tidak dapat terealisasi dengan baik (-12,5%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim”, dilakukan langkah strategi yaitu:

1. Pengembangan sarana dan prasarana drainase.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.
3. Konservasi sumber daya air.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
3. Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/cembung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder.
3. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Program pengendalian banjir.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder			
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	10,309,297,500.00	9,897,539,450.00	96.01

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	191,450,000.00	174,740,000.00	91.27
Program Pengendalian Banjir	7,848,348,500.00	7,362,766,500.00	93.81

**Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan pelayanan air limbah domestik	%	94%	100%	106,38%
Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	%	69,58%	89,32%	126,31%

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal” belum dapat dihitung.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat.

Dengan arah kebijakan yaitu: Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengelolaan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL (sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah			

### Tersedianya sistem pengelolaan air minum

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	%	74	93,47	126,31%

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan air minum” dalam proses penghitungan.

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan air minum”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan dan peningkatan sistem air minum dan non perpipaan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari cipanis kabupaten kuningan ke kota Cirebon serta sumber air baku lainnya.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah			

### Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	kasus	10	10	100%

Pencapaian sasaran “Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang. Meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
2. Pemberian akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	623,860,000.00	458,010,000.00	73.42
Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang			

### Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%	%	26	3,22	-12,38

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan” dapat tidak terealisasi dengan baik (12,30%).

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Penataan lingkungan kawasan permukiman perkotaan.

Dengan arah kebijakan yaitu: Menata lingkungan permukiman, meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program lingkungan sehat perumahan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	88,045,000.00	0.00	0.00

### Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah	Rumah	15.056	2000	-13,29%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan”, dilakukan langkah strategi yaitu: Pengembangan rumah sehat sederhana.

Dengan arah kebijakan yaitu: Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milih yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan lainnya.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah: Program pengembangan perumahan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Program Pengembangan Perumahan	404,000,000.00	397,321,000.00	98.35

**Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	%	84	84	100%

Sebagai upaya mencapai sasaran “Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang”, dilakukan langkah strategi yaitu: Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan umum massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar.

2. Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kaki, penyandang viabilitas dan pemakai sepeda.

Sebagai implementasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, maka program yang dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan pelayanan angkutan.
2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Berdasarkan hasil realisasi anggaran APBD Kota Cirebon Tahun 2015 diperoleh:

PROGRAM	TAHUN 2015		% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	249,040,000.00	245,540,000.00	98.59
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	148,720,000.00	147,465,000.00	99.16

### 3.3.Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2015 dengan Tahun 2014

Berikut tabel perbandingan pencapaian target tahun 2015 dengan tahun 2014

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>Misi Ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon yang religius</b>						
1.1.1	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	75%	20%	75%	0%
1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	80%	90%	75%	89,86%
1.2.2	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi	Peringkat 7 tingkat provinsi	10	Peringkat 9 tingkat provinsi	9 besar

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.2.3	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik yang bermuansa agama	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
<b>Misi ke-2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN</b>						
2.1.1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	99%	75%	63%
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	5 kasus/ 1000 PNS	4 kasus/ 1000 PNS	6 kasus/100 0 PNS	6 kasus/1000 PNS
		Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WDP	WDP	WDP	WDP
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	9/70	14/70	16/70
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	100 berkas	136 berkas	100 berkas	99 berkas
2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%	80 poin	74,51 poin	75 poin	77,79 poin
		Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	PMA (280 M) PMDN (475 M)	PMA (na) PMDN (1.321.066.815.350)	PMA (250 M) PMDN (425 M)	PMA (250 M) PMDN (425 M)

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2.1.5	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%	80 poin	79,83 poin	80 poin	79,8 poin
2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018.	5%	5%	5%	5%
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95%	80 poin	n/a	80 poin	80 poin
2.3.2	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	88% (1 peraturan e-government)	0	84% (1 peraturan e-governme nt)	84% (1 peraturan e-government)
		Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	38 sistem yang terbangun	38 sistem	34 sistem yang terbangun	n/a
<b>Misi ke-3: Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum</b>						
3.1.1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
3.2.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	22%	n/a	24%	n/a
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	40 titik	n/a	45 titik	35 titik
3.3.1	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan	9 kasus	17 kasus	10 kasus	9 kasus
3.4.1	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	20%	n/a	10%	10%

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3.5.1	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik	10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan	10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan
3.6.1	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya	50%	70%	60%	50%
3.7.1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari		Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari
<b>Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat</b>						
4.1.1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	13 tahun di tahun 2011	Data belum keluar dari BPS	13 tahun di tahun 2011	14 tahun
		Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	11,5 tahun 2011	Data belum keluar dari BPS	11 tahun 2011	11 tahun
4.2.1.	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1	70,13 tahun 2011	71,81	69,8 tahun 2011	69,97 tahun
4.2.2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS.	66%	81,45%	63%	89%
4.3.1.	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi
4.4.1.	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	35%	33,09%	30%	31,03%

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	74 jenis	74 jenis	72 jenis	72 jenis
4.5.1.	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat				
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	391.567	686.121	373.736 orang	596.046 orang
4.6.1.	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	28,14%	Data belum ada	29,19%	n/a
4.7.1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	26 kasus	60 kasus	28 kasus	56 kasus
4.8.1.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	29.919 orang	102.702 orang	30.407 orang	84.443 orang
4.9.1.	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender diatas 30% perempuan	34%	0%	32%	n/a
<b>Misi ke-5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan</b>						
5.1.1.	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Percentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	2,9%	0,34%	2,20%	n/a
5.1.2.	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	5%	7,2%	4%	n/a
<b>Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup</b>						
6.1.1.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	9,88%	10,0008%	9,84%	n/a
		Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	68%	Na	64%	n/a

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>6.1.2.</b>	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	0,4 Ha	Na	0,4 Ha	n/a
<b>6.1.3.</b>	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 5 lokasi, air sungai 7 lokasi, air laut 3 titik	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi
<b>6.1.4.</b>	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	74%	73%	72%	n/a
	dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	5%	5%	1%	n/a
<b>6.2.1.</b>	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akseletasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	98,10%	80%	96,80%	90%
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	94%	91,83%	92%	98%
<b>6.2.2.</b>	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	16 titik	2 titik	17 titik	17 titik
<b>6.2.3.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik	94%	100%	92%	92%
		Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	69,58%	89,32%	67,29%	n/a
<b>6.2.4.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	74%	93,47%	72%	n/a
<b>6.3.1.</b>	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus.	10	10	10 Kasus	10 Kasus

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>6.4.1.</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%.	26%	3,22%	28%	28%
<b>6.4.2.</b>	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah.	15.056 rumah	2000 rumah	16.756 rumah	n/a
<b>6.4.3.</b>	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	84%	84%	82%	60%

### **3.4.Hambatan dan Upaya Pencapaian Indikator Sasaran**

Pelaksanaan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cirebon tahun 2013-2018 mengalami hambatan dan tantangan. Adapun hambatan dan tantangan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### Hambatan

- Personil
  - Pemerataan dan penyebaran pegawai negeri sipil yang belum merata sehingga ada SKPD yang kurang pegawai namun ada SKPD yang merasa kelebihan pegawai.
  - Penempatan dan pengisian pegawai pada suatu jabatan terkadang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Mekanisme kerja
  - Masih terdapat SKPD yang belum memiliki SOP.
  - Pelaksanaan koordinasi antar SKPD yang masih lemah dan masih ada ego sektoral yang besar dari masing-masing pemangku kepentingan.
  - Penataan sistem yang belum optimal.

- Proses pengukuran kinerja dan fungsi pelaporan yang belum optimal dan terintegrasi dengan masing-masing bidang dan urusan.
- Penggunaan data dasar yang sudah tidak relevan lagi terhadap kondisi sekarang sehingga mengakibatkan realisasi menjadi terlalu kecil.

➤ Anggaran

- Jumlah anggaran yang terbatas namun dihadapkan pada target dan realisasi yang hampir bersamaan sehingga perlu adanya penentuan skala prioritas yang optimal.

### **3.5. Perbandingan dengan Target Nasional**

#### A. Data Capaian SPM Berdasarkan Indikator

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
1.	- Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
1		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	
		Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	50%	
		Cakupan layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	
		Cakupan layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	
	<b>Total capaian</b>	<b>630% : 8 = 78,75%</b>		
2	Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	73%	
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	125%	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need )	77,15%	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	126,52%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang ber- KB.	111,79%	
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (Dua) Desa/Kelurahan	100%	
		Ratio Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (Satu) petugas di setiap masyarakat 30 % setiap tahun	100%	
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun	16,66%	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun	100%	
	<b>Total capaian</b>	<b>830 % : 9 = 92%</b>		
3.	Bidang Perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.	90%	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.	80%	
		Tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani	80%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		angkutan umum dalam trayek.		
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota.	100%	
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	100%	
		Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kota yang telah memiliki terminal.	90%	
		Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	-	
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian	-	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
4.		kendaraan bermotor di Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.		
		Terpenuhinya standard keselamatan Kapal dan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kota.	90%	
	<b>Total capaian</b>	<b>830% : 11 = 75 %</b>		
4.	- Bidang Informasi dan Komunikasi	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	-	
		Media baru seperti website (media online)	100%	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	-	
		Media interpesonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	100%	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	-	
	<b>Total capaian</b>	<b>200% : 5 = 40 %</b>		
5.	Bidang Pendidikan			
	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kota</b>	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	Dinas Pendidikan

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,	100%	
		Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	53,93%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	60,20%	
		Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	79,54%	
		Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik.	75,24%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	6,98%	
		setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	77,03%	
		setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;	46,91%	
		setiap SMP/MTs tersedia satu ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	34,88%	
		setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik	60,47%	
		setiap SD/MI memiliki 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	96,48%	
		setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk	76,34%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		setiap rumpun mata pelajaran;		
		setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-4;	88,37%	
		di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih)	98,46%	
		di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;	94,75%	
		setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.	95,35%	
		semua kepala SD/MI di kota berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	82,56%	
		semua kepala SMP/MTs di kota berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	61,40%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		semua pengawas sekolah dan madrasah di kota memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	88,27%	
		pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	69,77%	
		Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	
		Jumlah SMP/MTS yang mendapat kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	
		setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	71,60%	
	<b>Total Capaian</b>	<b>1.781,32% : 14 = 100%</b>		
	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan</b>			
		setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,	79,43%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;		
		setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	44,24%	
		setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	85,18%	
		Jumlah SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;	81,48%	
		Jumlah SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	60,47%	
		Jumlah guru tetap SD/MI bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	95,83%	
		Jumlah guru tetap SMP/MI bekerja 37,5 jam per	70,85%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.		
		satuan pendidikan SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV -VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII -IX : 27 jam per minggu	90,12%	
		satuan pendidikan SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV -VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII -IX : 27 jam per minggu	93,02%	
		satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		satuan pendidikan SMP/MTS yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	
		Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	97,91%	
		setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	94,68%	
		kepala sekolah SD/MI yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester kepala sekolah SMP/MTS yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	98,43%	
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	89,53%	
		kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTS	90,12%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik;		
		setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah(MBS),yaitu memiliki rencana kerja tahunan.	27,91%	
		setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki laporan tahunan.	97,61%	
		setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki komite sekolah yang berfungsi baik.	94,87%	
		Kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTS menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik;	100%	
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah	95,35%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		(MBS) yaitu memiliki rencana kerja tahunan.		
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki laporan tahunan.	95,35%	
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki komite sekolah yang berfungsi baik.	90,70%	
	<b>Total capaian</b>	<b>1.995,08 : 27 = 73,89%</b>		
6.	Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni, yaitu kegiatan yang bersifat kajian.	80%	Dinas Pemuda, Olah, Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan Fasilitasi Seni, yaitu dukungan bagi kesenian di Kota Cirebon agar dapat hidup lebih layak.	143%	
		Cakupan Gelar Seni, yaitu ajang pertanggung jawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral, sajian artistic maupun profan lainnya.	133%	
		Misi Kesenian, yaitu salah satu upaya untuk penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk kesenian dan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu jati diri.	300%	
		Cakupan Sumber Daya Manusia	250%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
		Cakupan Tempat	200%	
		Cakupan Organisasi	98%	
	<b>Total Capaian</b>	<b>1.204 : 7 = 172 %</b>		
7.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	0 %	Dinas PU, Perumahan, dan ESDM (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
		Tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	60%	
		Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab/kota	70%	
		Persentasi penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	80%	
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	25%	
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20%	
		Persentase pengangkutan sampah	75,47%	
		Persentase pengoperasian TPA	50%	
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)lebih dari 2 kali setahun	35%	
		Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan	100%	
		Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	5%	
		Persentase tersedianya layanan izin usaha konstruksi (IUJK)	0%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
		dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap		
		Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	100%	
		Meningkatnya ketersediaannya RTH	11%	
	<b>Total Capaian</b>	<b>630,47% : 14 = 45%</b>		
8.	Bidang Perumahan Rakyat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	76,57%	Dinas PU, Perumahan, dan ESDM (Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan PDAM)
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	45,35%	
		Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	0%	Tidak mengisi kuesioner
	<b>Total Capaian</b>	<b>121,92% : 3 = 40,64%</b>		
9.	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	80%	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	86%	
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	73%	
	<b>Total capaian</b>	<b>339% : 3 = 113%</b>		
	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	80%	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah	80%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
		Manajemen Kebakaran (WMK)		
		Presentase Aparatur Damkar memenuhi Standar Kualifikasi	64%	
		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	90%	
	<b>Total Capaian</b>	<b>330%:4= 82,5%</b>		
	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kab/Kota	64,71%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Patroli Siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	97%	
	<b>Total capaian</b>	<b>261% : 4 = 65,62%</b>		
10	Bidang Sosial	Presentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	11,05%	
		Presentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.	6,35%	
		Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	77,78%	
		Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	0%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		prasaranan pelayanan kesejahteraan sosial		
		% Korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	
		% Korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaranan tanggap darurat lengkap	-	
		% Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	2,79%	
	<b>Total capaian</b>	<b>97,97% : 7 = 13.9%</b>		
11.	Bidang Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65,01%	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	-	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	71,15%	
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	84,63%	
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	15,80%	
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	91,90%	
	<b>Total capaian</b>	<b>328% : 7 = 46,9%</b>		

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
12.	Bidang Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita.	120%	Kantor Ketahanan Pangan
		Penguatan cadangan pangan.	18,2	
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100%	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,54%	
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80,95%	
		Penanganan daerah rawan pangan	100%	
	<b>Total capaian</b>	<b>603% : 7 = 86%</b>		
13.	Bidang Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bumil K4	93,26%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	111,18%	
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi kebidanan	93,84%	
		Cakupan Pelayanan Nifas	86,70%	
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang di tangani	95,65%	
		Cakupan Kunjungan Bayi	87,00%	
		Cakupan Desa / Kelurahan UCI	95,45%	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	83,80%	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin	46,50%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	95,90%	
		Cakupan Peserta KB Aktif	81,45%	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000 penduduk &lt; 15 tahun</li> </ul>	4	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesembuhan penderita TBC BTA Positif</li> </ul>	71,80%	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan balita dengan Pneumonia yang di obati</li> </ul>	39,45%	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS</li> </ul>	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penderita DBD yang ditangani</li> </ul>	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%	
		Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>NO.</b>	<b>Bidang Urusan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian</b>	<b>SKPD</b>
		Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif	100%	
	<b>Total capaian</b>	<b>1881,98% : 22 = 85%</b>		
14.	Bidang Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha 123edic123 / bidang usaha unggulan	80%	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerja sama kemitraan	60%	
		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	90%	
		Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal	90%	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	85%	
		Terimplementasinya 123sistim pelayanan informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	85%	
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	90%	
	<b>Total capaian</b>	<b>580% : 7 = 82,85%</b>		
15	Bidang Lingkungan Hidup	% usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan	37%	

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
		teknis pencegahan pencemaran air		
		% usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	40%	Tidak beroperasi
		% Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup	100%	
	<b>Total capaian</b>	<b><math>277\% : 4 = 69,25\%</math></b>		
	<b>Total Capaian Keseluruhan SKPD</b>	<b><math>12919,77\% : 95 = 135,99\%</math></b>		

### **3.6. Evaluasi dan Analisis Anggaran**

Kondisi umum belanja daerah Kota Cirebon Tahun 2015 berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Rincian penggunaan APBD kota Cirebon adalah sebagai berikut:

#### **Pos Pendapatan**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp 319.564.598.000,- |
| 2. Pendapatan Transfer    | Rp 973.971.235.020,- |

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

3. Lain-Lain pendapatan yang sah Rp 104.661.502.000,-

Pos Belanja

a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.559.715.103.220,-

b. Belanja Langsung Rp 890.343.848.849,-

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50,548,862,057.00	46,984,723,232.00	92.95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41,413,461,608.00	35,491,459,466.00	85.70
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,436,045,100.00	3,116,522,200.00	90.70
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,069,579,525.00	1,881,933,675.00	90.93
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,482,751,297.00	7,850,336,025.00	92.54
Program Keluarga Berencana	337,075,000.00	336,575,000.00	99.85
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	610,000,000.00	607,228,030.00	99.55
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	148,720,000.00	147,465,000.00	99.16
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,515,123,300.00	1,400,509,550.00	92.44
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	198,275,500.00	193,942,500.00	97.81
Program Pengembangan Data/Informasi	188,625,000.00	163,429,000.00	86.64
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	389,326,000.00	383,107,700.00	98.40
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,304,410,007.00	15,868,535,231.00	140.37
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,326,759,900.00	1,149,418,943.00	86.63

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Pengembangan Nilai Budaya	340,985,000.00	336,665,000.00	98.73
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	414,245,000.00	411,485,000.00	99.33
Program Pengembangan Perumahan	404,000,000.00	397,321,000.00	98.35
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5,037,903,600.00	3,415,031,770.00	67.79
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	830,085,900.00	724,521,300.00	87.28
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1,625,346,800.00	1,603,999,900.00	98.69
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	150,000,000.00	149,618,850.00	99.75
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	658,132,000.00	646,863,000.00	98.29
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	624,073,000.00	485,049,450.00	77.72
Program Kerjasama Pembangunan	140,470,000.00	140,100,000.00	99.74
Program Lingkungan Sehat Perumahan	88,045,000.00	-	0.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	689,800,000.00	657,773,879.00	95.36
Program Pemanfaatan Ruang	60,500,000.00	59,340,000.00	98.08
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	236,122,450.00	226,169,000.00	95.78
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	98,423,000.00	92,359,000.00	93.84
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,000,000,000.00	-	0.00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	138,820,000.00	136,655,000.00	98.44
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	85,762,000.00	76,226,000.00	88.88

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	200,000,000.00	175,871,000.00	87.94
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	190,000,000.00	183,847,500.00	96.76
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	62,285,000.00	62,110,000.00	99.72
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	49,400,000.00	49,400,000.00	100.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1,214,941,000.00	1,191,933,000.00	98.11
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5,179,354,500.00	4,437,127,550.00	85.67
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	556,463,250.00	506,747,300.00	91.07
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	162,190,950.00	156,915,950.00	96.75
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50,000,000.00	49,180,000.00	98.36
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	314,833,500.00	309,716,750.00	98.37
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22,769,812,268.00	19,083,254,901.00	83.81
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	70,199,912,216.00	65,068,065,632.00	92.69
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	249,040,000.00	245,540,000.00	98.59
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	72,032,000.00	70,291,800.00	97.58
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	132,414,450.00	129,084,500.00	97.49
Program Pendidikan Menengah	49,717,926,550.00	45,859,262,678.00	92.24
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	577,771,000.00	574,891,000.00	99.50

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Pengembangan Kemitraan	160,745,500.00	150,065,500.00	93.36
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	170,994,000.00	168,213,950.00	98.37
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	128,112,450.00	126,695,600.00	98.89
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	55,532,500.00	49,990,500.00	90.02
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	623,860,000.00	458,010,000.00	73.42
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	630,494,000.00	539,138,000.00	85.51
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	63,016,000.00	62,789,250.00	99.64
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	476,845,000.00	413,411,000.00	86.70
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	154,765,750.00	151,876,500.00	98.13
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	110,676,000.00	109,335,000.00	98.79
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	240,803,000.00	225,489,700.00	93.64
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	86,581,000.00	86,108,500.00	99.45
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	95,000,000.00	94,433,400.00	99.40
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	51,640,000.00	37,940,000.00	73.47
Program Pendidikan Non Formal	455,230,000.00	452,461,095.00	99.39

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,935,855,000.00	72,855,000.00	3.76
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	217,590,000.00	204,229,000.00	93.86
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	71,374,600.00	68,289,000.00	95.68
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	105,431,000.00	103,911,000.00	98.56
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,627,580,000.00	1,607,379,500.00	98.76
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	1,362,000,000.00	1,346,729,000.00	98.88
Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum	10,000,000,000.00	8,930,791,649.00	89.31
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	281,486,250.00	279,241,050.00	99.20
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	299,705,000.00	284,586,500.00	94.96
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3,004,320,000.00	3,112,622,700.00	103.60
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	235,100,000.00	228,362,000.00	97.13
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	489,925,000.00	472,479,000.00	96.44
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	260,000,000.00	237,194,000.00	91.23
Program Pembinaan dan Pemasarkan Olah Raga	1,391,630,500.00	1,374,798,450.00	98.79
Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	775,678,800.00	766,370,200.00	98.80

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	314,843,000.00	308,702,000.00	98.05
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	869,860,750.00	843,126,500.00	96.93
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	203,810,000.00	199,409,000.00	97.84
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3,022,726,525.00	2,411,561,150.00	79.78
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,606,492,000.00	1,596,805,592.00	99.40
Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin	2,293,953,600.00	1,728,379,100.00	75.34
Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	143,315,000.00	137,190,000.00	95.73
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	339,362,200.00	332,296,100.00	97.92
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	322,499,900.00	318,652,400.00	98.81
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	196,917,400.00	120,081,700.00	60.98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran	51,780,000.00	51,780,000.00	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,105,000,000.00	1,641,013,000.00	148.51
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,879,169,300.00	1,747,706,450.00	93.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,558,045,594.00	35,480,792,700.00	2277.26
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	223,440,000.00	215,767,000.00	96.57
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,517,196,250.00	1,464,248,000.00	96.51

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,210,401,500.00	3,145,626,490.00	97.98
Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	250,049,800.00	245,268,800.00	98.09
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	94,540,000.00	88,200,000.00	93.29
Program Pendaftaran Penduduk	1,109,676,500.00	989,723,500.00	89.19
Program Peningkatan Pelayanan UPTD	1,256,910,000.00	1,135,188,915.00	90.32
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	388,399,424.00	319,379,700.00	82.23
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	50,000,000.00	33,125,100.00	66.25
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	18,612,526,800.00	14,408,467,983.00	99.81
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	407,755,000.00	394,844,000.00	96.83
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,139,570,000.00	2,049,048,950.00	95.77
Program Peningkatan Pelayanan Parkir	390,000,000.00	358,947,075.00	92.04
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah	1,180,000,000.00	1,171,068,279.00	99.24
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	958,000,000.00	906,684,000.00	94.64
Program Penanggulangan Korban Bencana	59,226,500.00	57,526,500.00	97.13
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	3,545,050,000.00	2,529,148,200.00	71.34
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	44,027,500.00	6,296,500.00	14.30
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	480,162,800.00	474,192,800.00	98.76

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	2,423,408,000.00	2,377,252,000.00	98.10
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi	664,757,400.00	659,963,050.00	99.28
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,379,599,500.00	881,220,500.00	63.88
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	845,811,780.00	810,519,280.00	95.83
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	191,450,000.00	174,740,000.00	91.27
Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan	744,051,000.00	712,134,000.00	95.71
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	545,587,000.00	527,865,500.00	96.75
Program RW Bersih	495,136,750.00	473,809,900.00	95.69
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	815,028,000.00	804,290,000.00	98.68
Program Pencegahan Penyakit Hewan	225,708,500.00	188,172,500.00	83.37
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	177,253,250.00	174,505,750.00	98.45
Program Pendidikan Kedinasan	825,735,900.00	776,077,400.00	93.99
Program Pengendalian Banjir	7,848,348,500.00	7,362,766,500.00	93.81
Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1,270,231,500.00	970,384,000.00	76.39
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	1,576,286,950.00	1,485,963,250.00	94.27
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	454,712,500.00	418,237,000.00	91.98
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	4,831,079,900.00	3,988,625,000.00	82.56

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	15,949,083,374.00	12,871,066,759.00	80.70
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	95,939,500.00	94,232,500.00	98.22
Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau	3,023,917,000.00	2,393,987,000.00	79.17
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4,236,073,640.00	4,000,398,950.00	94.44
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,332,516,950.00	1,065,495,450.00	79.96
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,110,399,680.00	1,659,154,510.00	78.62
Program penataan kelembagaan	718,348,500.00	53,166,000.00	7.40
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	150,753,500.00	144,426,000.00	95.80
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	104,999,950.00	103,742,450.00	98.80
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	288,621,000.00	257,611,000.00	89.26
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	309,075,000.00	223,405,000.00	72.28
Program Pembinaan Pemerintahan	620,646,500.00	298,059,025.00	48.02
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	203,835,394,502.00	177,006,242,209.00	86.84
Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat	3,150,230,000.00	2,473,733,700.00	78.53
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	239,336,500.00	234,666,500.00	98.05
Program Pembinaan Administrasi Umum	2,216,757,500.00	1,849,008,300.00	83.41
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	101,310,861,000.00	5,175,377,500.00	5.11
Program Penanggulangan Bencana	669,260,000.00	632,670,000.00	94.53
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	37,789,900.00	37,789,900.00	100.00

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	2,937,468,000.00	-	0.00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3,527,215,580.00	3,421,301,000.00	97.00
Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	5,203,752,575.00	5,113,906,717.00	98.27
Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	1,386,424,300.00	1,109,904,100.00	80.06
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	8,820,340,500.00	4,697,474,756.00	53.26
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	1,921,137,000.00	150,000,000.00	7.81
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	100,534,050.00	98,909,050.00	98.38
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	260,922,300.00	223,062,300.00	85.49
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	1,835,101,000.00	1,652,599,969.00	90.05
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	10,309,297,500.00	9,897,539,450.00	96.01
Program Kerukunan Umat Beragama	1,029,252,900.00	839,847,100.00	81.60
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	147,187,000.00	82,129,000.00	55.80
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	34,320,387,905.00	35,064,756,118.00	102.17
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4,358,920,500.00	4,258,724,650.00	97.70
Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD	3,129,594,400.00	2,739,873,700.00	87.55
Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	3,500,000,000.00	3,032,916,400.00	86.65
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD	1,285,310,500.00	1,226,622,325.00	95.43
Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas	1,243,833,000.00	1,050,522,455.00	84.46

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Laporan Keuangan Daerah			
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	26,550,167,000.00	26,187,341,000.00	98.63
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	633,815,000.00	625,681,500.00	98.72
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	2,843,697,000.00	2,653,899,000.00	93.33
Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan	32,026,479,500.00	31,590,907,700.00	98.64
Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	3,353,860,000.00	3,333,525,000.00	99.39
<i>Jumlah</i>	Rp 887.265.671.357,-	Rp 734.975.848.463,-	82,84%

## BAB IV

### PENUTUP

#### **4.1.Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD selama tahun anggaran 2015. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
<b>1.1.1</b>	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	75%	20%	26%
<b>1.2.1</b>	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	80%	90%	
<b>1.2.2</b>	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 5 besar tingkat provinsi	Peringkat 7 tingkat provinsi	10	0
<b>1.2.3</b>	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik yang bermuansa agama	0 kasus	0 kasus	100%
<b>2.1.1</b>	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	99%	132%

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	5 kasus/ 1000 PNS	4 kasus/ 1000 PNS	120%
		Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	100%	100%	100%
2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WDP	WDP	100%
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	100%	100%	100%
2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	9/70	64,29%
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	100 berkas	136 berkas	136%
2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%	80 poin	74,51 poin	93,14%
		Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	PMA (280 M) PMDN (475 M)	PMA (na) PMDN (1.321.066.815.350)	
2.1.5	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 90%	80 poin	79,83 poin	99,79%
2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018.	5%		
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95%	80 poin		
2.3.2	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	0 titik	0 titik	100%
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	88% (1 peraturan e-government)	0	0

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
	mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	38 sistem yang terbangun	38 sistem	100%
<b>3.1.1</b>	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus	100%
<b>3.2.1</b>	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	22%		
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	40 titik		
<b>3.3.1</b>	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan	9 kasus	17 kasus	11%
<b>3.4.1</b>	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	20%		
<b>3.5.1</b>	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik	
<b>3.6.1</b>	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya	50%	70%	140%
<b>3.7.1</b>	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari		
<b>4.1.1</b>	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	13 tahun di tahun 2011 11,5 tahun 2011		
<b>4.2.1.</b>	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1	70,13 tahun 2011	71,81	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
<b>4.2.2.</b>	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS.	66%	81,45%	123,41%
<b>4.3.1.</b>	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 5 besar tingkat provinsi di tahun 2018	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	100%
<b>4.4.1.</b>	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	35%	33,09%	94,54%
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	74 jenis	74 jenis	100%
<b>4.5.1.</b>	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat			
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	391.567	686.121	175,22%
<b>4.6.1.</b>	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	28,14%		
<b>4.7.1.</b>	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	26 kasus	60 kasus	-30,77%
<b>4.8.1.</b>	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	29.919 orang	102.702 orang	-143,26%
<b>4.9.1.</b>	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender diatas 30% perempuan	34%	0%	0%
<b>5.1.1.</b>	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	2,9%	0,34%	11,72%
<b>5.1.2.</b>	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	5%	7,2%	144%

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
<b>6.1.1.</b>	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018 Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun	9,88% 68%	10,0008	
<b>6.1.2.</b>	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	0,4 Ha		
<b>6.1.3.</b>	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 5 lokasi, air sungai 7 lokasi, air laut 3 titik	
<b>6.1.4.</b>	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	74% 5%	73% 5%	
<b>6.2.1.</b>	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	98,10% 94%	80% 91,83%	
<b>6.2.2.</b>	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	16 titik	2 titik	
<b>6.2.3.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	94% 69,58%	100% 89,32%	

*Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2015*

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI
<b>6.2.4.</b>	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	74%	93,47%	
<b>6.3.1.</b>	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus.			
<b>6.4.1.</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%.	26%	3,22%	
<b>6.4.2.</b>	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah.	15.056 rumah	2000 rumah	
<b>6.4.3.</b>	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	84%	84%	100%

Adapun hambatan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

#### Hambatan

##### 1. Personil

- (1) Pemerataan dan penyebaran pegawai negeri sipil yang belum merata sehingga ada SKPD yang kurang pegawai namun ada SKPD yang merasa kelebihan pegawai.
- (2) Penempatan dan pengisian pegawai pada suatu jabatan terkadang tidak sesuai dengan kompetensinya.

##### 2. Mekanisme kerja

- (1) Masih terdapat SKPD yang belum memiliki SOP.
- (2) Pelaksanaan koordinasi antar SKPD yang masih lemah dan masih ada ego sektoral yang besar dari masing-masing pemangku kepentingan.
- (3) Penataan sistem yang belum optimal.
- (4) Proses pengukuran kinerja dan fungsi pelaporan yang belum optimal dan terintegrasi dengan masing-masing bidang dan urusan.
- (5) Penggunaan data dasar yang sudah tidak relevan lagi terhadap kondisi sekarang sehingga mengakibatkan realisasi menjadi terlalu kecil.

### 3. Anggaran

- (1) Jumlah anggaran yang terbatas namun dihadapkan pada target dan realisasi yang hampir bersamaan sehingga perlu adanya penentuan skala prioritas yang optimal.

### 4.2.Saran

Penyusunan LAKIP merupakan salah satu proses dari sebuah sistem yang bernama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga ketika salah satu sub sistem tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berangkat dari sebuah proses perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif antar SKPD di lingkungan pemerintah kota Cirebon dalam rangka mencapai visi dan misi kota Cirebon. Jika dalam proses perencanaannya kurang baik, maka SAKIP akan menjadi kurang baik demikian pula jika dalam proses perencanaannya mampu mampu memberikan indikator kinerja yang SMART (*spesific, measurable, reasonable, achieveable*), maka diharapkan seluruh SKPD mampu mengejawantahkan setiap sasaran menjadi kinerjanya yang baik.

Dalam LAKIP tahun 2015 ini, terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat dihitung dan diketahui pencapaian realisasinya karena harus melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitungnya. Oleh karena itu diharapkan dikemudian hari perlu dievaluasi dari masing-masing indikator sasaran sehingga dapat diperoleh indikator sasaran yang SMART.